



Tana Toraja Dalam Blokade DI/TII 1953-1965

Rusmala Dewi Kabubu¹, Sakmawati², Khaeruddin³, A.Noer Chalifah Ramadhany⁴, Tiara Nur'aini⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar

¹⁾rusmala.dewi@unm.ac.id

²⁾sakmawati@unm.ac.id

³⁾khaeruddin@unm.ac.id

⁴⁾a.noer.chalifah@unm.ac.id

⁵⁾tiara.nur'aini@unm.ac.id

ABSTRAK

Bergabungnya Qahhar Mudzakkar dan pasukannya ke dalam DI/TII didasari karena kekecewaan akibat aspirasi mereka untuk diintegrasikan ke dalam kesatuan TNI tidak diterima. Alasan utama pemerintah menolak karena profesionalitas ketentaraan. Mereka dianggap kurang cakap untuk dijadikan TNI. Pemberontakan Qahhar Mudzakkar dengan membawa DI/TII sebagai payung untuk mengumpulkan pasukan dimulai pada tahun 1953. Sejak diproklamasikannya penggabungan Qahhar Mudzakkar dan pasukannya ke dalam DI/TII pada 7 Agustus 1953, maka sejak saat itu segala aktivitas Qahhar Mudzakkar dan pasukannya dikenal dengan aksi DI/TII di Sulawesi Selatan. Tana Toraja tidak lepas dari pengaruh DI/TII sepanjang tahun 1953-1965 karena wilayah ini merupakan bagian dari Sulawesi Selatan. Menarik untuk dikaji bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat aksi DI/TII di Tana Toraja. Blokade yang dilakukan pasukan DI/TII menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Tana Toraja hampir di seluruh sektor kehidupan mereka. Selama dua belas tahun masyarakat Tana Toraja hidup dalam ketakutan dan penderitaan akibat aktivitas DI/TII di wilayah mereka. Berbagai kesulitan dan penderitaan dirasakan masyarakat Tana Toraja dalam berbagai sektor kehidupan, baik dari sektor ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan Pendidikan.

Kata Kunci: DI/TII, Qahhar Mudzakkar, Tana Toraja, Blokade.

ABSTRACT

The joining of Qahhar Mudzakkar and his troops into DI/TII was based on disappointment that their aspirations to be integrated into the TNI were not accepted. The main reason the government refused was because of the professionalism of the army. They are considered less capable to be used as TNI. Qahhar Mudzakkar's rebellion by bringing DI/TII to gather troops began in 1953. Since the proclamation of Qahhar Mudzakkar and his troops into DI/TII on August 7, 1953, since then all the activities of Qahhar Mudzakkar and his troops are known as DI/TII actions in South Sulawesi. Tana Toraja could not escape the influence of DI/TII during 1953-1965 because this region was part of South Sulawesi. It is interesting to study the impact of DI/TII's actions in Tana Toraja. The blockade by DI/TII forces caused difficulties for the people of Tana Toraja in almost all sectors of their lives. For twelve years the people of Tana Toraja lived in fear and suffering due to DI/TII activities in their area. Various difficulties and suffering were felt by the people of Tana Toraja in various sectors of life, from the economic, socio-cultural, socio-political, and education sectors.

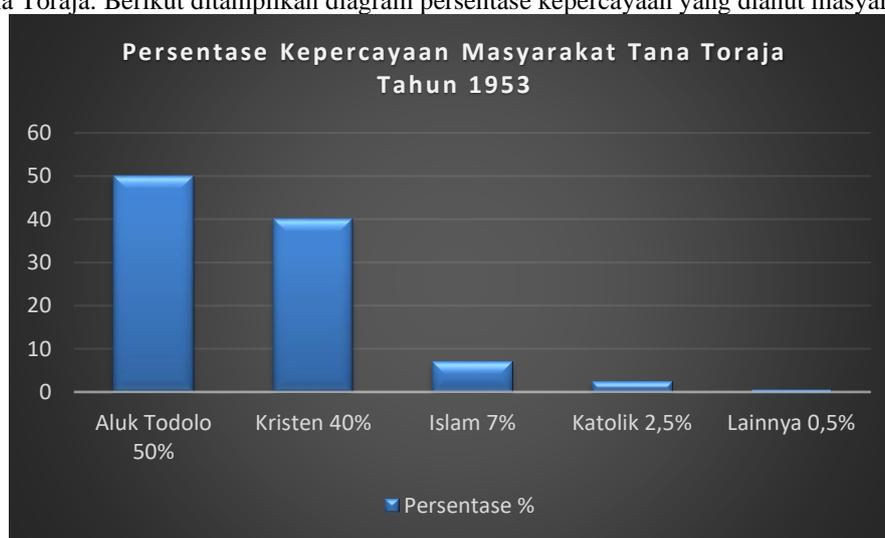
Keywords: DI/TII, Qahhar Mudzakkar, Tana Toraja, Blockade.

PENDAHULUAN

Konflik antara Qahhar Mudzakkar dengan Pemerintah Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950. Konflik itu timbul akibat kekecewaan dari Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) terhadap keputusan Pemerintah Indonesia yang tidak memberikan ruang kepada mereka untuk menjadi bagian dari TNI. Aspirasi mereka untuk diintegrasikan ke dalam kesatuan TNI tidak diterima karena alasan profesionalitas ketentaraan (Latief, 2000). KGSS sendiri awal mula pembentukannya diprakarsai oleh Qahhar Mudzakkar dengan mengutus Saleh Sjahban pada 2 Februari 1949. Saleh Sjahban merupakan orang kepercayaan Qahhar Mudzakkar, ditugaskan untuk melihat bagaimana kondisi kelaskaran di Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan Saleh Sjahban, kelaskaran di Sulawesi Selatan tercerai-berai dan tidak terkoordinasi dengan baik. Keadaan demikian membuat Qahhar Mudzakkar mengambil tindakan dengan melakukan penyatuan pasukan seluruhnya dalam satu komando dengan nama Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, KGSS memiliki peran besar. Keinginan terbesar dari KGSS adalah pengakuan dan penghargaan atas jasa-jasa mereka selama berjuang melawan penjajah (Rasyid MS, 1996). Rupanya, keinginan untuk diintegrasikan ke dalam kesatuan TNI tidak disambut dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah tetap pada keputusan awal yang menganggap KGSS kurang cakap untuk dijadikan TNI. Perbedaan pendapat terus terjadi antara Qahhar

Mudzakkar dengan Kawilarang. Karena tidak ada titik temu antara keduanya dalam menyelesaikan persoalan KGSS, Qahhar Mudzakkar memilih jalan lain untuk mengangkat harkat dan martabat pasukannya, yaitu bergabung dengan DI/TII Kartosuwiryo. Hal tersebut semakin membuat konflik antara Qahhar Mudzakkar dan pasukannya dengan Pemerintah Indonesia makin memanas. Upaya damai beberapa kali coba dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Konflik terus terjadi hingga Qahhar Mudzakkar sebagai pemimpin tertinggi DI/TII di Sulawesi Selatan dinyatakan meninggal dalam baku tembak yang terjadi di Lasolo Sulawesi Tenggara.

Sulawesi Selatan menjadi wilayah kekuasaan Qahhar Mudzakkar dan pasukannya dengan membawa nama DI/TII. Pengaruh DI/TII di Sulawesi Selatan sangat besar dengan awal mulanya gerakan ini banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Tana Toraja yang merupakan bagian dari Sulawesi Selatan tidak lepas dari pengaruh DI/TII sepanjang 1953-1965. Aktivitas DI/TII banyak terjadi di daerah ini, dengan segala dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Aktifnya DI/TII di Tana Toraja menandakan adanya keterlibatan orang Toraja di dalamnya. Baik itu yang terlibat tanpa paksaan maupun yang terlibat karena keadaan terpaksa. Jika dilihat baik dari budaya maupun kepercayaan, Tana Toraja cukup berbeda dibanding wilayah lainnya di Sulawesi Selatan. Tana Toraja menjadi unik karena minoritasnya jika dilihat dari sistem kepercayaan. Namun, mengapa ada dari sebagian masyarakatnya bergabung dengan DI/TII yang membawa Islam sebagai inti gerakan mereka. Ini menjadi pertanyaan besar, apa motivasi dari masyarakat Tana Toraja bergabung dengan gerakan DI/TII. Pada tahun 1953, *Aluk Todolo* masih menjadi kepercayaan mayoritas masyarakat Tana Toraja diikuti Kristen dan Islam. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan asli yang dianut masyarakat sebelum masuknya agama-agama lain di Tana Toraja. Berikut ditampilkan diagram persentase kepercayaan yang dianut masyarakat Tana Toraja.



Gambar 1. Persentase Kepercayaan Masyarakat Tana Toraja Tahun 1953

Islam menempati posisi ketiga dari jumlah masyarakat yang menganutnya. Meskipun demikian, awal diterimanya DI/TII di Tana Toraja bukan karena faktor agama, melainkan faktor kesamaan rasa yang kecewa terhadap Pemerintah Indonesia. Aktivitas DI/TII di Sulawesi Selatan mengakibatkan terjadinya perang saudara dan banyak kekacauan seperti pembunuhan, pembakaran rumah, dan perusakan fasilitas umum (Gonggong, 1992a). Kondisi Tana Toraja yang dihuni oleh etnik Toraja dengan adat istiadat yang masih dipegang teguh, serta kepercayaan yang kontras dengan mayoritas masyarakat Sulawesi Selatan, menarik untuk dikaji dalam konteks DI/TII Qahhar Mudzakkar.

Keberadaan dan aktivitas DI/TII di Tana Toraja didukung dengan kondisi geografis wilayah ini yang berada di dataran tinggi dengan hutan yang luas dan berada pada Kawasan pegunungan. Karena berada di Kawasan pegunungan, di Tana Toraja terdapat banyak tikungan jalan yang mendukung taktik perang gerilya yang dilakukan oleh DI/TII. Taktik gerilya dilakukan dengan cara penyerangan atau pengadangan tiba-tiba kemudian menarik diri masuk ke dalam hutan. Adanya tikungan jalan memudahkan gerombolan DI/TII untuk melakukan pengadangan di jalan (Gonggong, 1992b). Dengan demikian taktik gerilya sukses dilakukan di Tana Toraja.

Qahhar Mudzakkar memakai nama DI/TII sejak tahun 1953, dan sampai akhir tahun ini berhasil menguasai hampir seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, terutama wilayah pedalaman. Wilayah yang gagal dikuasai DI/TII adalah kota Makassar. Wilayah ini menjadi satu-satunya yang tidak berhasil dikuasai oleh Qahhar Mudzakkar dan pasukannya (Arsip Marsuki Arifin No. 374, 1953). Sebab utama Kota Makassar tidak berada di bawah pengaruh DI/TII karena wilayah ini di bawah kekuasaan TNI sehingga DI/TII kesulitan untuk menyebarluaskan pengaruhnya. Qahhar Mudzakkar membagi wilayah kekuasaannya dengan menetapkan berlakunya garis pemisah antara wilayah *de facto* DI/TII dengan kota-kota yang dikuasai oleh TNI. Cara yang dilakukan DI/TII untuk menetapkan garis pemisah itu adalah dengan melakukan pembakaran rumah penduduk yang berjarak 3km dari kota. Adanya bekas bakaran menandakan batas wilayah kekuasaan DI/TII. Selanjutnya, masyarakat diberikan pilihan, apakah masuk ke kota atau masuk ke wilayah DI/TII (Ansar et al., 2018). Adapun maksud diberlakukannya hal tersebut, agar TNI tidak mendapatkan bantuan dari rakyat (Mattalioe, 1965a).

Dukungan masyarakat Toraja dalam gerakan DI/TII salah satunya dengan melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok desa sebagai simpatisan DI/TII untuk menarik dukungan Masyarakat (H Japan, 2015). Awalnya, banyak yang memberikan dukungan kepada DI/TII dengan sukarela karena dianggap mewakili aspirasi masyarakat Tana Toraja. Namun dilain sisi, ada pula yang terpaksa memberikan bantuan karena takut menjadi korban. Dengan keadaan yang

memaksa masyarakat memberikan bantuan kepada DI/TII, mengakibatkan mereka menjadi korban. *Kepala Kampung* (Kepala Desa) banyak yang menjadi sasaran TNI dan DI/TII. Tuduhan memberikan bantuan kepada DI/TII mengakibatkan mereka ditangkap dan dipenjara oleh TNI. Namun di sisi lain, tuduhan juga datang dari DI/TII, mereka dianggap memberikan informasi kepada TNI ketika persembunyian DI/TII berhasil dilacak, sehingga gerombolan DI/TII melakukan perusakan di kampung/desa dengan membakar rumah penduduk (Pagallaran, 2015).

Lingkup temporal penelitian ini selama dua belas tahun, yaitu tahun 1953-1965, yang berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari aksi DI/TII di Tana Toraja. Penelitian ini tentunya memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penikmat Sejarah. Kehadiran DI/TII di Tana Toraja selama ini dipandang sebagai konflik agama jika dilihat dari permukaannya saja. Jika melihat lebih dalam lagi, keberadaan DI/TII di Tana Toraja juga didukung oleh masyarakat Tana Toraja itu sendiri. Dengan bergabungnya mereka ke dalam gerakan DI/TII Qahhar Mudzakkar sekaligus juga meresmikan keterlibatan mereka pada gerakan itu. Jadi tidak tepat jika kehadiran DI/TII di Tana Toraja diidentikkan dengan konflik agama. Penelitian mengenai DI/TII sudah banyak dilakukan, baik itu dari awal terbentuknya DI/TII Kartosuwiryo yang ditulis oleh Holk H. dengel "*Darul Islam NII dan Kartosuwiryo: Angan-Angan yang Gagal*", Barbara Silars Harvey "*Pemberontakan Qahhar Mudzakkar dari Tradisi ke DI/TII*", Anhar Gonggong "*Abdul Qahhar Mudzakkar dan Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan 1950-1965*", Ali Hadara "*DI/TII di Kawasan Perairan Tiworo dan Sekitarnya: dari Batalyon X07 KGSS Hingga Resimen II Hasanuddin*" Van Dijk "*Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*". Kelima penelitian terkait masih berfokus ke daerah yang mayoritas Islam, berbeda dengan Tana Toraja yang kepercayaannya berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan yang juga mayoritas Islam.

Blokade dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengepungan (penutupan) suatu daerah sehingga orang atau barang tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Sedangkan DI/TII merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu Darul Islam (DI) dengan arti suatu negara yang pemerintahannya memberlakukan hukum Islam dan Tentara Islam Indonesia (TII) sebagai angkatan perangnya. Dengan demikian blokade DI/TII merupakan penutupan suatu daerah oleh angkatan perang pemerintahan yang memberlakukan hukum Islam. Meskipun keterlibatan masyarakat Tana Toraja dengan DI/TII awalnya tanpa paksaan, bukan berarti mereka lepas dari aksi-aksi DI/TII yang merugikan. Karena adanya aktivitas DI/TII di Tana Toraja mengakibatkan masyarakat Tana Toraja berada dalam masa-masa sulit selama DI/TII aktif di daerah itu.

METODE PENELITIAN

Sejarah digolongkan sebagai ilmu karena memiliki metode penelitian. Merekonstruksi masa lalu dalam tulisan sejarah tentunya harus melalui tahapan metode penelitian baku yang telah ditetapkan dalam penelitian sejarah. Menurut Edward Hallett Carr sejarah adalah proses yang berkesinambungan dari interaksi para sejarawan dan faktanya, dialog tanpa akhir antara masa kini dan masa lalu (Hallet Carr, 1961). Interaksi antara sejarawan dan fakta yang diperoleh merupakan suatu proses yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Fakta yang diperoleh masih berupa potongan-potongan *puzzle*. Potongan-potongan *puzzle* yang dikumpulkan akan menjadi kisah ketika telah utuh dan mendapatkan penafsiran dari peneliti. Pada dasarnya dalam metode penelitian sejarah harus melalui empat tahapan. Sebelum masuk ke tahapan pertama, terlebih dahulu harus menentukan topik penelitian. Menentukan topik penting untuk dilakukan agar penelitian tetap fokus dengan memilih topik apa yang akan diteliti. Setelah ditetapkan topik yang akan diteliti, peneliti akan masuk ke tahapan pertama dalam metode penelitian sejarah. Heuristik merupakan tahapan pertama yang harus dilalui bagi seorang peneliti sejarah. Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik yang telah ditentukan di awal. Pada tahapan ini akan menyita banyak waktu peneliti dan juga menuntut seorang peneliti untuk cakap dalam mengumpulkan berbagai sumber sejarah agar penelitian yang dilakukan berjalan lancar dan tidak mengalami kendala (Sjamsuddin, 2007a).

Dalam melakukan proses pengumpulan sumber, ada dua tahap yang dapat ditempuh. *Pertama*, penelitian lapangan, pada tahapan ini ditentukan lokasi penelitian berfokus pada daerah Tana Toraja sepanjang tahun 1953-1965, artinya wilayah mencakup Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja dalam konteks saat ini. Pada penelitian lapangan yang dilakukan berfokus melakukan metode wawancara kepada saksi-saksi dan pelaku sejarah selama masa DI/TII di Tana Toraja. Tentunya dalam menentukan saksi yang diwawancarai memiliki kriteria, yaitu minimal berusia 10 tahun pada saat kejadian dan tidak mengalami gangguan ingatan. Strategi yang baik dituntut dalam melakukan wawancara dengan menciptakan suasana nyaman mungkin antara peneliti dengan informan. Keberhasilan dalam suatu wawancara membutuhkan kecakapan dari pewawancara (Thompson, 2012). *Kedua*, penelitian pustaka, tahapan ini menuntut penulis untuk banyak membaca berbagai referensi yang relevan tentang DI/TII sehingga peneliti mampu melihat gambaran umum dari topik yang diteliti dan juga untuk menemukan perbedaan penelitian. Selain itu pada tahap ini peneliti mengumpulkan sumber pustaka berupa arsip, buku, dan laporan hasil penelitian tentang DI/TII, khususnya di Tana Toraja.

Setelah mengumpulkan sumber, maka dilakukan pengelompokan sumber dengan memisahkan sumber primer (*primary source*) dan sumber sekunder (*secondary sources*). Sumber primer merupakan sumber utama berupa arsip dan pelaku atau saksi sejarah, serta koran sezaman. Observasi dilakukan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional di Makassar, dan melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci. Di ANRI Jakarta dan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar penulis banyak mendapatkan dokumen arsip yang menceritakan peristiwa DI/TII di Tana Toraja dan Sulawesi Selatan. Keberadaan dokumen arsip ini menambah sumber sejarah yang ditemukan penulis dalam melakukan penelitian. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta juga menyediakan berbagai literatur yang mendukung penelitian.

Sumber sekunder merupakan sumber pendukung dari sumber primer seperti buku, jurnal, serta tesis. Semua sumber yang dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya diolah dengan melakukan kritik baik itu eksternal maupun internal. Kritik dilakukan untuk mendapatkan kebenaran atas sumber yang dikumpulkan. Kritik internal dilakukan dengan memverifikasi isi suatu sumber dengan sumber lain (Sjamsuddin, 2007b). Artinya antara satu sumber dengan sumber lainnya dilakukan perbandingan dengan melihat isi. Sedangkan pada kritik eksternal untuk membuktikan apakah sumber yang diperoleh otentik atau tidak, dengan memperhatikan jenis kertas, jenis tulisan, dan gaya bahasa yang digunakan. Kesaksian dalam wawancara juga dapat dilakukan kritik dengan melihat kesaksiannya apakah bertahan atau mengalami perubahan ketika dilakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pencarian kebenaran (Gottschalk, 1975) (Sjamsuddin, 2007c). Setelah melakukan kritik maka diperoleh fakta sejarah. Dari sumber sejarah menjadi data sejarah dan menjadi fakta sejarah. Setelah didapatkan fakta sejarah maka seorang peneliti sejarah akan masuk ke tahapan ketiga, yaitu interpretasi. Pada tahapan ini dituntut untuk menganalisis dan menafsirkan fakta yang diperoleh dengan mengaitkan antara satu fakta dengan fakta lainnya sehingga menjadi suatu kisah sejarah. Untuk mengaitkan fakta-fakta yang ada, penulis harus berhati-hati agar terhindar dari subjektivitas. Tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah adalah historiografi, pada tahapan ini seluruh fakta yang telah diinterpretasi ditulis menjadi kisah sejarah yang ilmiah (Abdullah & Surjomiharjo, 1985). Tulisan ini tentunya menggunakan metode penelitian sejarah dengan menjalankan tahapan-tahapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian ini membahas dampak yang ditimbulkan akibat blokade yang dilakukan DI/TII di Tana Toraja. Aktivitas dan blokade DI/TII pimpinan Qahhar Mudzakkar sangat besar dampaknya bagi kehidupan masyarakat Tana Toraja. Selama dua belas tahun masyarakat Tana Toraja mengalami berbagai penderitaan akibat aktivitas DI/TII di wilayah ini. Berbagai kesulitan dan penderitaan dirasakan di berbagai sektor kehidupan mereka, baik dari sektor ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan pendidikan. Banyak upaya dilakukan pemerintah untuk menghentikan aktivitas DI/TII di Sulawesi Selatan. Upaya diplomasi beberapa kali dilakukan namun berakhir gagal. Tidak ada kesepakatan yang terjadi antara pihak pemerintah dan pihak DI/TII. Selanjutnya, pemerintah dengan terpaksa melakukan upaya perlawanan untuk menghentikan aksi DI/TII, namun upaya ini juga berujung gagal. Terjadi perang antara TNI dan DI/TII yang berdampak buruk bagi masyarakat Sulawesi Selatan secara umum, dan masyarakat Tana Toraja secara khusus. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai dampak yang ditimbulkan dari blokade DI/TII di Tana Toraja, berikut akan dibahas secara mendalam.

1. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Proses-proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan ini melibatkan keputusan tentang siapa yang menghasilkan barang, bagaimana barang tersebut diproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Keputusan ekonomi yang baik dapat meningkatkan mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Secara keseluruhan, ekonomi adalah bidang yang sangat luas dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, mulai dari kebijakan pemerintah hingga keputusan yang kita buat sebagai konsumen dan produsen di pasar. Termasuk bagi masyarakat Tana Toraja salah satu bidang yang sangat penting dalam aspek kehidupannya adalah aspek ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka.

Dampak pada sektor ekonomi sepanjang masa pemberontakan DI/TII di Tana Toraja sangat menyulitkan masyarakat. Salah satu aktivitas yang dilakukan DI/TII adalah perdagangan gelap dengan membeli senjata dari oknum TNI yang membutuhkan uang. Rupanya ada oknum TNI "*nakal*" yang sengaja menjual senjata ke gerombolan DI/TII untuk kepentingannya dan keuntungannya sendiri (Mattalioe, 1965b). Hal ini semakin menambah kekuatan DI/TII dalam menghadapi TNI karena memiliki senjata untuk melakukan perlawanan. Selain membeli senjata ilegal, monopoli perdagangan juga dilakukan gerombolan DI/TII dengan dibantu Andi Sose melalui suatu badan Penampungan Bekas Pejuang Bersenjata yang mengontrol seluruh barang yang keluar dan masuk di Tana Toraja (Arsip Provinsi Sulawesi 1950-1960 Reg. 285, 1953). Seluruh hasil alam yang ada di Tana Toraja harus dijual melalui badan tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak memiliki hak untuk menentukan harga jual. Banyak terjadi kesulitan-kesulitan dalam sektor ekonomi sebagai akibat dari aktivitas DI/TII di Tana Toraja. Pertempuran antara gerombolan DI/TII dengan TNI mengakibatkan banyak jalur transportasi terputus sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan itu terjadi karena tidak seimbang antara pengeluaran dan pendapatan daerah. Pengeluaran banyak diperuntukkan untuk membenahi jembatan-jembatan yang rusak oleh gerombolan DI/TII. Banyaknya jembatan yang rusak dengan maksud untuk menghambat pergerakan TNI. Dengan rusaknya jembatan, terputus pula jalur transportasi antar distrik di Tana Toraja. (Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 573, 1956). Selain menghambat pergerakan TNI, perusakan jembatan juga mengakibatkan terjadinya kelangkaan bahan makanan di Tana Toraja. Hal ini terjadi karena akses perhubungan terputus dan mobil-mobil yang membawa bahan makanan terhambat perjalanannya (Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 564, 1953).

Jika dilihat dari kondisi geografis, kondisi alam Tana Toraja tidak mendukung untuk dijadikan lahan pertanian. Hanya sedikit saja lokasi yang bisa dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat. Keterbatasan lahan pertanian di Tana Toraja mengharuskan wilayah ini mendapat suplai beras dari daerah lain. Kondisi memprihatinkan terjadi pada Januari 1955, terjadi kelangkaan bahan makanan, terutama beras di Tana Toraja. Tidak seimbang ketersediaan beras dengan jumlah penduduk mengakibatkan kelangkaan itu terjadi. Pasokan beras dari luar sulit untuk didapatkan karena aktivitas DI/TII yang sering melakukan pengadangan dan perusakan jembatan. Selain kelangkaan beras, juga terjadi kelangkaan

bahan makanan lainnya. Kebutuhan sehari-hari terus meningkat karena kurangnya persediaan pedagang akibat sulitnya melakukan perhubungan dengan daerah-daerah luar, misalnya kota Makassar (Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 687, 1955). Harga kebutuhan pokok seperti garam, gula, minyak tanah, minyak goreng, dan beras semakin hari semakin meningkat (Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 687, 1955). Masyarakat di Distrik Bittuang bahkan pernah tidak mendapatkan garam, gula, dan minyak goreng untuk dikonsumsi. Kelangkaan bahan makanan membuat masyarakat mengonsumsi makanan seadanya saja, dibandingkan mereka harus kelaparan untuk menunggu suplai bahan makanan dari luar Tana Toraja (Misalayuk, 2016). Di Distrik Buakayu, selama Maret 1955, gerombolan DI/TII gencar-gencarnya mengadakan pengacauan untuk menggagalkan Pemilu. Pada Maret 1955, sekitar 1000 orang gerombolan DI/TII bersenjata memasuki kampung Rano (Buakayu) dan berusaha menggagalkan pemilu yang sedang berlangsung. Sebagai akibat dari gangguan keamanan yang terjadi, masyarakat tidak dapat mengolah sawahnya, hal itu mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil karena banyaknya aksi-aksi gerombolan DI/TII yang membuat masyarakat ketakutan (Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 687, 1955).

2. Sosial Budaya

Sosial budaya merujuk pada hubungan yang erat antara aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Konsep ini menggambarkan cara-cara kehidupan, nilai-nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, serta bagaimana semua elemen tersebut berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan sosial seseorang dan kelompok dalam suatu komunitas. Termasuk di dalamnya masyarakat Tana Toraja yang tentunya juga memiliki tradisi, nilai, dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sosial dan budaya saling berinteraksi dan membentuk pola-pola kehidupan dalam masyarakat. Budaya mempengaruhi cara individu atau kelompok berinteraksi dalam konteks sosial, sementara pola hubungan sosial dapat memperkuat atau mengubah norma dan nilai budaya. Sistem sosial budaya juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Misalnya jika ditinjau dari segi pendidikan, nilai budaya masyarakat dapat mempengaruhi sistem pendidikan, misalnya cara mengajarkan nilai-nilai moral atau cara berpikir kritis. Dari segi ekonomi, budaya kerja dan norma sosial dapat memengaruhi cara individu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta bagaimana distribusi sumber daya sosial dilakukan. Dan dari segi politik, ideologi dan nilai-nilai budaya sering kali menjadi dasar bagi kebijakan politik, seperti hak asasi manusia, demokrasi, atau kebijakan multikulturalisme. Secara keseluruhan sosial budaya menggambarkan bagaimana masyarakat dibentuk oleh interaksi antara faktor sosial dan budaya, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam membentuk cara hidup, kebiasaan, dan identitas suatu kelompok atau komunitas.

Selama DI/TII aktif di Tana Toraja terjadi gelombang pengungsi dari pedalaman menuju ke kota. Karena kondisi perkampungan yang dikacaukan oleh DI/TII memaksa mereka untuk mengungsi ke Makale dan Rantepao karena dua distrik ini merupakan kota di Tana Toraja. Meminjam istilah Ali Hadara, yaitu adanya *Masyarakat kota* dan *Masyarakat hutan*. *Masyarakat kota* diidentikkan sebagai pihak yang non-kooperatif dengan DI/TII dan *masyarakat hutan* diidentikkan sebagai pihak yang kooperatif dengan DI/TII (Hadara, 1998). Kondisi ini sangat pas untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di Tana Toraja pada masa itu. Terjadi perang saudara antara masyarakat Bittuang yang dianggap sebagai *masyarakat hutan* dan masyarakat Rindingallo sebagai *masyarakat kota*. Terjadi pertempuran antar mereka sebagai pihak yang pro dan kontra terhadap Gerakan DI/TII di Tana Toraja. Bermula ketika masyarakat Bittuang yang mendapat pengaruh-pengaruh DI/TII menyerang Rindingallo dan membakar rumah-rumah penduduk. Serangan tersebut dibalas oleh masyarakat Rindingallo dengan dibantu TNI sehingga menyebabkan masyarakat Bittuang dan gerombolan DI/TII menarik diri masuk ke hutan untuk menyelamatkan diri dari serangan TNI (Misalayuk, 2016).

Pengungsian ke kota terus terjadi seiring aksi teror yang gencar dilakukan gerombolan DI/TII. Ada sekitar 263 orang dari Distrik Buakayu dan Distrik Makale pada awal tahun 1954 memohon untuk pindah ke daerah yang lebih aman di Luwu. Banyaknya pengungsi dari pedalaman membuat pemerintah di kota kewalahan. Januari 1955, diperkirakan jumlah pengungsi sekitar 21.530 orang. Keadaan ini juga menyulitkan pemerintah pada masa itu untuk menjamin bahan makanan tetap tersedia untuk para pengungsi. Hal yang makin menyulitkan keadaan pada masa itu karena jembatan-jembatan banyak yang dirusak, transportasi dari dalam dan keluar Tana Toraja banyak mengalami hambatan. Suplai ikan dari Palopo yang diperuntukkan bagi pengungsi tidak dapat dikonsumsi karena telah busuk akibat lamanya waktu yang ditempuh untuk sampai ke Tana Toraja (Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 687, 1955). Banyaknya jembatan yang dirusak oleh DI/TII serta pengadangan-pengadangan yang sering dilakukan membuat interaksi masyarakat dengan daerah di luar Tana Toraja menjadi sulit. Tana Toraja terisolasi dari dunia luar dengan berbagai kesulitan yang dihadapi pada masa itu.

Dampak terhadap budaya di Tana Toraja dapat dilihat dari keberadaan DI/TII yang membuat masyarakat setempat mengalami kesulitan dalam melaksanakan upacara adat. Adanya tuntutan untuk memberikan sokongan atau bantuan kepada gerombolan DI/TII makin menambah kesengsaraan masyarakat. Sokongan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gerombolan DI/TII di hutan. Jika dicermati lebih dalam, keadaan gerombolan DI/TII di dalam hutan juga sulit, melihat Tana Toraja yang hanya mengandalkan bahan makanan dari luar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan gerombolan DI/TII di dalam hutan, mereka harus meminta kepada masyarakat. Posisi masyarakat seakan terjepit karena dengan adanya bantuan yang diberikan, TNI menganggap mereka mendukung gerakan DI/TII. Padahal pada kenyataannya, banyak dari antara masyarakat Tana Toraja hanya dengan terpaksa memberikan bantuan untuk menghindari konflik dengan gerombolan DI/TII. Jika masyarakat menolak untuk membantu, maka gerombolan DI/TII akan marah dan tidak segan-segan untuk membakar rumah penduduk. Di sisi lain, kelangkaan bahan makanan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melaksanakan upacara adat, ditambah lagi dengan adanya permintaan bantuan oleh gerombolan DI/TII. Kondisi demikian makin menambah kelangkaan komoditas-komoditas penting yang digunakan

untuk melaksanakan upacara adat, seperti beras dan kerbau. Selain bantuan untuk memenuhi kebutuhan gerombolan DI/TII di hutan, kewajiban membayar pajak juga dibebankan kepada masyarakat oleh DI/TII. Keadaan demikian makin menambah masalah dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja. Perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan karena untuk membeli bahan makanan untuk dikonsumsi merasa sulit, ditambah lagi untuk membeli bahan makanan yang akan digunakan pada upacara adat. Hewan ternak (babi) yang banyak digunakan pada upacara adat banyak dimusnahkan oleh DI/TII pada saat itu. Gerombolan DI/TII sering melakukan kekacauan pada saat masyarakat melaksanakan upacara adat. Mereka merampas kerbau dan makanan yang disediakan pada saat masyarakat melangsungkan upacara adat untuk dibawa ke hutan. Bahkan gerombolan DI/TII pernah menembaki mayat yang sedang diupacarakan sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat Tana Toraja dan berbalik melawan DI/TII. Peristiwa itu menjadikan masyarakat Tana Toraja tidak senang lagi dengan aksi-aksi yang dilakukan DI/TII (Misalayuk, 2016).

3. Sosial Politik

Sosial politik merujuk pada interaksi antara masyarakat (sosial) dan struktur serta proses politik (politik) dalam suatu negara atau komunitas. Konsep ini mencakup bagaimana faktor sosial, seperti kelas sosial, budaya, ekonomi, dan identitas kelompok, berpengaruh terhadap dinamika politik dan bagaimana kebijakan politik mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Aspek sosial ini berhubungan dengan struktur masyarakat, seperti hubungan antar kelompok sosial, kelas, etnis, agama, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Faktor-faktor sosial yang ada dapat mempengaruhi cara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat berinteraksi dengan sistem politik, serta bagaimana mereka memperoleh akses terhadap sumber daya dan kekuasaan. Sedangkan aspek politik berhubungan dengan struktur kekuasaan, sistem pemerintahan, kebijakan publik, partisipasi politik, dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Proses politik mencakup bagaimana keputusan diambil, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana institusi politik bekerja dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Sosial politik merupakan salah satu bidang yang tidak bisa lepas dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Tana Toraja. Namun adanya peristiwa DI/TII yang terjadi di wilayah Tana Toraja, juga membawa dampak pada kehidupan masyarakat dari segi sosial politiknya. Jika ditinjau dari hubungan antara sosial dan politik itu sangat erat, karena kebijakan politik sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada, sementara kebijakan tersebut juga memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial. Misalnya, kebijakan ekonomi atau sosial dapat memperburuk atau memperbaiki ketimpangan sosial, mempengaruhi distribusi kekayaan, dan mengubah hubungan antar kelompok dalam masyarakat.

Aksi-aksi gerombolan DI/TII juga berdampak pada kehidupan sosial politik di Tana Toraja. Kondisi pemerintahan tidak berjalan dengan baik, seperti yang terjadi di Distrik Bittuang dan distrik-distrik lainnya yang dijadikan markas DI/TII. Kondisi itu membuat kepala-kepala kampung dan pegawai-pegawainya memutuskan untuk meninggalkan kampungnya dan melarikan diri ke kota untuk melindungi diri. Posisi sulit dirasakan oleh masyarakat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tetap tinggal dan pasrah dengan keadaan bersama gerombolan DI/TII. Hal ini menimbulkan kemarahan dan kebencian masyarakat setempat terhadap pegawai-pegawai dan kepala kampung yang melarikan diri, sebab mereka dianggap tidak bertanggung jawab (Misalayuk, 2016). Kepala-kepala kampung yang wilayahnya diduduki DI/TII merasa dilema, jika bertahan maka mereka akan menjadi bulan-bulanan DI/TII. Mereka mengalami penderitaan karena ketika TNI berhasil menemukan lokasi persembunyian DI/TII di wilayah mereka, maka mereka menjadi pihak yang disalahkan oleh DI/TII karena dianggap mata-mata TNI. Dilain sisi, mereka juga dianggap sebagai simpatisan DI/TII oleh TNI, sehingga posisi mereka terjepit dan sulit untuk bertindak. Jalan tengah yang mereka ambil adalah melarikan diri ke kota untuk meminta perlindungan dan pengamanan dari pemerintah karena di distrik mereka sendiri sudah tidak ada jaminan keamanan lagi (Pagallaran, 2015).

Banyaknya kepala kampung dan pegawainya yang melarikan diri membuat hubungan pemerintahan antara distrik dan kampung tidak berjalan dengan baik. Hampir semua distrik di Tana Toraja mengalami kesulitan serupa, kecuali Distrik Tikala dan Sa'dan karena terdapat pos-pos tentara yang jumlahnya memadai jika diharuskan berhadapan dengan gerombolan DI/TII (Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 564, 1953). Penyebab lain yang membuat banyak distrik di Tana Toraja berhasil dikuasai DI/TII karena TNI tidak pernah mengadakan patroli di distrik tersebut. Entah karena jumlah gerombolan TNI yang terbatas atau karena hal lain yang menyebabkan mereka tidak berpatroli di distrik tersebut. Keadaan di Distrik Simbuang tidak aman akibat tentara dari Makale tidak pernah mengadakan patroli. Karena hal itu gerombolan DI/TII berbulan-bulan melakukan perampokan, pembunuhan, dan pembakaran rumah penduduk (Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 608, 1953). Pada dasarnya banyak pegawai pemerintahan takut untuk memberikan informasi kepada TNI karena adanya ancaman dari gerombolan DI/TII, seperti yang terjadi di Distrik Tondon/Nanggala, mereka mendapatkan pengancaman dari gerombolan DI/TII (Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 926B, 1952).

4. Pendidikan

Pendidikan merujuk pada proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia atau masyarakat pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Pendidikan tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga informal melalui pengalaman sehari-hari, keluarga, serta lingkungan sosial. Kehidupan yang memprihatinkan dirasakan pula oleh guru dan anak-anak di Tana Toraja. Keadaan yang begitu kacau membuat kehidupan tidak nyaman lagi. Kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan begitu dirasakan oleh anak-anak Tana Toraja. Padahal jika ditinjau dari segi pentingnya pendidikan, pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia karena pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang dapat

memperoleh kompetensi yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tujuan pribadi dan profesional. Melalui pendidikan, tidak hanya aspek akademik yang diajarkan tetapi juga pengembangan karakter, sikap dan kemampuan sosial. Sehingga pendidikan sangat penting bagi semua masyarakat termasuk yang ada di Tana Toraja, namun karena peristiwa DI/TII membuat berbagai sekolah tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Bagaimana tidak, banyak sekolah yang ditutup karena siswanya mengungsi ke kota. Mereka takut terhadap ancaman penculikan oleh gerombolan DI/TII. Di Distrik Buakayu, gerombolan DI/TII mengancam akan menculik anak-anak. Karena ancaman tersebut, ketika gerombolan DI/TII masuk ke perkampungan, maka anak-anak tadi bersembunyi di semak-semak untuk menghindari penculikan. Masyarakat Buakayu yang ketakutan mendesak pemerintah untuk menempatkan tentara di kampung mereka (Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 788, 1951). Di sisi lain, banyaknya pelajar Makale/Rantepao yang turut bergabung menjadi simpatisan DI/TII, mengakibatkan sekolah-sekolah ditutup karena kekurangan siswa (Tulak, 2016). Banyaknya sekolah yang ditutup bukan hanya karena kekurangan siswa, tetapi juga karena tidak ada lagi guru yang mengajar. Guru-guru di Tana Toraja ketakutan karena aksi-aksi gerombolan DI/TII yang banyak menculik mereka. Tujuan dari banyaknya guru yang diculik oleh gerombolan DI/TII adalah untuk mengajar anak-anak mereka di hutan (Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 926B, 1951). Karena dianggap pendidikan itu penting, untuk mengajar anak-anak mereka membaca, menulis, dan berhitung, maka perlu ada guru yang tinggal bersama-sama mereka di hutan.

KESIMPULAN

Fokus utama tulisan ini membahas dampak signifikan yang ditimbulkan dari aktivitas DI/TII di Tana Toraja selama dua belas tahun sepanjang tahun 1953-1965. Awal mula gerakan ini mendapat simpati dari masyarakat karena dianggap mewakili aspirasi masyarakat. Khususnya di Tana Toraja, keterlibatannya dalam gerakan DI/TII karena kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah pusat. Meskipun mendapat simpati masyarakat, aksi DI/TII menimbulkan banyak kesulitan dalam kehidupan masyarakat. Blokade yang dilakukan DI/TII membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Tana Toraja, baik itu dalam sektor ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan Pendidikan. Kesulitan dalam sektor ekonomi begitu dirasakan masyarakat Tana Toraja pada waktu itu. Jalur transportasi banyak yang terputus dan mengakibatkan pasokan bahan makanan ke Tana Toraja terhambat. Di Tana Toraja, masyarakat hanya mengandalkan jalur transportasi darat. Banyaknya jembatan yang rusak membuat Tana Toraja terisolasi dari dunia luar. Mata pencaharian masyarakat sebagai pedagang terganggu dan mengakibatkan perputaran ekonomi terhambat. Banyak penduduk yang meninggalkan mata pencahariannya karena keadaan yang memaksa mereka masuk hutan atau mengungsi ke kota. Monopoli perdagangan yang dilakukan DI/TII menyebabkan kelangkaan barang sehingga terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok. Mata pencaharian sebagai petani dan peternak juga terganggu karena mereka harus mengungsi ke kota atau bahkan ke hutan. Pada sektor sosial budaya, gelombang pengungsian ke kota pada akhirnya mengubah pola interaksi masyarakat. Pelaksanaan upacara adat terganggu karena adanya kelangkaan bahan makanan untuk digunakan dalam upacara adat dan juga karena gangguan-gangguan yang dilakukan gerombolan DI/TII ketika masyarakat melaksanakan upacara adat yang sedang berlangsung. Di sektor sosial politik berdampak pada tidak stabilnya jalannya pemerintahan karena pejabat desa banyak melarikan diri menghindari DI/TII. Karena tidak adanya pejabat desa yang aktif, membuat hubungan antar wilayah terputus dan memperburuk koordinasi administrasi antara desa. Pada sektor pendidikan, sekolah-sekolah ditutup karena tidak ada siswa. Guru juga banyak yang meninggalkan tugasnya karena menjadi target penculikan DI/TII untuk dibawa ke hutan dan diharuskan mengajar anak-anak DI/TII di hutan. Pada kesimpulannya, tulisan ini menghadirkan pemahaman baru mengenai konflik di wilayah minoritas dan peran Tana Toraja dalam pemberontakan DI/TII.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini. Tanpa partisipasi dan keterlibatan dari berbagai pihak penelitian ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak sehingga penelitian ini dapat berjalan dan selesai dengan baik. Kepada para narasumber/informan yang bersedia diwawancarai untuk berbagi pengalaman dan informasi terkait peristiwa DI/TII di Tana Toraja, yakni Bapak Welem Pagallaran, Bapak H. Japan, Bapak JB Misalayuk, dan Bapak Piter Tulak. Juga untuk semua tempat penulis melakukan penelitian, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sejawat di lingkungan akademik yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan penelitian ini. Untuk keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan motivasi dan juga dukungan moral selama penelitian hingga penulisan artikel ini selesai. Tanpa partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak penelitian ini tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Semoga karya ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Surjomiharjo, A. (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ansar, W. A., Ahmadin, & Ridha, M. R. (2018). Bulukumba di Tengah Pergolakan DI/TII 1952-1965. *Pattingalloang*, 5, 82.
- Arsip Marsuki Arifin No. 374. (1953). *Peta Dislokasi Gerombolan Achir Tahun 1953*.

- Arsip Provinsi Sulawesi 1950-1960 Reg. 285. (1953). *Pernyataan oleh Lapangan Pendidikan Sangakungang Sangulubai (SASI) Bori'/Rantepao Kepada Bapak Kapten Suroso Komandan Bn. 713 di Rantepao.*
- Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 564. (1953). *Rapat Pemerintahan yang Pertama dalam Tahun 1953 di Makale Pada Tanggal 28 Februari 1953.*
- Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 573. (1956). *Ichthisar: Konperensi Rutin Pemerintah ke III Daerah Tana Toraja Tanggal 31 Juli 1956 Bertempat dalam GNI Makale.*
- Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 608. (1953). *Pernyataan Rakyat Simbuang 1 April 1953.* Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 687. (1955). *Laporan Bulanan Selama Bulan Januari 1955.*
- Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 788. (1951). *Laporan Kepala Distrik Buakayu.*
- Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 926B. (1951). *Laporan Mingguan dari Distrik Tondon Nanggala II No. 2/RH/Rantepao.*
- Arsip Tana Toraja 901-1959 Reg. 926B. (1952). *Laporan Mingguan dari Distrik Tondon Nanggala. Rantepao 5/1/1952.*
- Gonggong, A. (1992). *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot Hingga Pemberontak.* Grasindo.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah, Terjemahan Nugroho Notosusanto.* Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- H Japan. (2015). *Wawancara.*
- Hadara, A. (1998). *DI/TII Di Kawasan Perairan Tiworo dan Sekitarnya: Dari Batalyon X07 KGSS Hingga Resimen II Hasanuddin.* Universitas Indonesia.
- Hallet Carr, E. (1961). *What is History.* Random House.
- Latief, Abd. (2000). *Dinamika Lokal Militer di Sulawesi Selatan "Dunia Militer di Indonesia"* (E. Polinggomang & S. Mappangara, Eds.). Gadjah Mada University Press.
- Mattalioe, B. (1965). *Kahar Muzakkar Dengan Petualangannya.* Delegasi.
- Misalayuk, J. (2016). *Wawancara.*
- Pagallaran, W. (2015). *Wawancara.*
- Rasyid MS, D. (1996). Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. *Bosara, No. 4 Th. III, 3.*
- Sjamsuddin, H. (2007a). *Metodologi Sejarah.* Ombak.
- Thompson, P. (2012). *Suara dari Masa Silam: Teori dan Metode Sejarah Lisan.* Ombak.
- Tulak, P. (2016). *Wawancara.*